

Penyuluhan dan Bimtek Kebijakan Akuntansi Bumdes Maju Jaya Desa Sumber Makmur Kecamatan Takisung Kabupaten Tala

Akhmad Yafiz Syam^{1*}, Lisandri², Mujenah³, Norbaiti⁴, Noor Asiah⁵

^{1,2,3,4}Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Indonesia Banjarmasin

*Email Korespondensi: yafiz@stiei-kayutangi-bjm.ac.id

Abstrak

Tujuan pengabdian masyarakat ini adalah memberikan bimbingan teknis dan menyediakan solusi bagi pengelola BUMDes Maju Jaya dalam menghadapi persoalan tata kelola organisasinya di bidang akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan. Sebagai BUMDes yang relatif baru berdiri, pengelola perlu memiliki acuan kebijakan akuntansi untuk dapat menyusun Standar Operasional Procedures (SOP) yang diperlukan dalam mengatur dan mempertanggungjawabkan sumberdaya keuangan. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah Focus Group Discussion (FGD) dan bimbingan teknis penyusunan kebijakan akuntansi yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan ETAP. Setelah dilakukan bimbingan teknis ini, peserta menyadari dan memahami bahwa untuk dapat menyediakan informasi keuangan yang sesuai dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan diperlukan kebijakan akuntansi yang sesuai dengan karakteristik BUMDes. Setelah kebijakan akuntansi ini tersusun, selanjutnya diperlukan pendampingan dalam Menyusun SOP Pelaporan Keuangan BUMDes.

Abstract

The purpose of this community service is to provide technical guidance and provide solutions for the management of BUMDes Maju Jaya in dealing with the problems of organizational governance in the field of accounting and financial accountability. As a relatively newly established BUMDes, managers need to have a reference accounting policy to be able to develop the standard operational procedures (SOP) needed in regulating and accounting for their financial resources. The method used in this service is Focus Group Discussion (FGD) and technical guidance on the preparation of accounting policies under ETAP Financial Accounting Standards. After this technical guidance was conducted, participants realized and understood that to be able to provide financial information following the qualitative characteristics of financial statements, accounting policies are required in accordance with the characteristics of BUMDes. After this accounting policy is established, further assistance is required in preparing the SOP for Financial Reporting BUMDes.

Keywords: *accounting policy, Standard Operating Procedures, Financial Accounting Standards ETAP, BUMDes*

PENDAHULUAN

Program strategis yang sedang digalakkan oleh Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan diantaranya dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Gerakan ini selaras dengan gerakan nasional terciptanya 5.000 desa mandiri dengan diberikannya dana desa yang diantaranya akan digunakan untuk mengembangkan permodalan BUMDes. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan setiap desa diharuskan membentuk BUMDes, sebagai salah satu upaya untuk pemberdayaan masyarakat sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Secara spesifik keberadaan BUMDes diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2015 tentang BUMDes (Permendes dan PDTT, 2015).

Terdapat 86 BUMDes yang sudah terbentuk di Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, namun baru 11 BUMDes yang aktif. Dari sebelas yang aktif tersebut, hanya ada dua BUMDes yang telah signifikan menyumbang Pendapatan Asli Desa yaitu di Desa Bumi Jaya sebesar Rp 16 juta pertahun dan Desa Bukit Mulia sebesar Rp 40-50 juta per tahun (portal.tanahlautkab.go.id,2020). Hal ini menunjukkan masih banyak BUMDes di Kabupaten Tanah Laut yang perlu dibina dan dikembangkan agar terjadi peningkatan aktifitas sekaligus produktivitas BUMDes sebagai katalisator penggerak perekonomian desa. Di desa Sumber Makmur, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2019 telah berdiri BUMdes dengan nama BUMDes Maju Jaya. BUMdes ini telah aktif sejak awal tahun 2020, dan mulai beroperasi dengan modal Rp. 80.000.000,- yang bersumber dari Dana Desa. Pada saat ini BUMDes Maju Jaya memanfaatkan sebagian modal tersebut untuk usaha peternakan penggemukan Sapi. Mengingat peran strategis BUMDes Maju Jaya di desa Gunung Makmur, tentu saja harus dikembangkan dan tidak cukup hanya mengandalkan usaha penggemukan sapi yang perputaran modalnya sangat lambat, sementara potensi lainnya masih banyak yang bisa dikembangkan di desa ini, maka diperlukan pengembangan usaha-usaha lainnya yang menguntungkan secara ekonomis (Dewi, 2014).

Dari perspektif manajemen organisasi, salah satu masalah yang dihadapi BUMDes Maju Jaya adalah belum memiliki dokumen *Standar Operational Procedures* (SOP) penyelenggaraan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan yang dapat memandu pengelola dalam membuat laporan keuangan dan menyusun perencanaan bisnisnya. Dokumen-dokumen ini diperlukan untuk mendukung perkembangan BUMDes dalam menjalankan roda usahanya. Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa BAB III pasal 12 ayat 3 bahwa Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kewajiban pengelola BUMDes membuat laporan keuangan (Permendes dan PDTT, 2015). BUMDes harus membuat laporan keuangan secara transparan dan akuntabel (Harto, 2018). Pengelola dan stakeholder BUMDes Maju Jaya memerlukan informasi akuntansi yang andal untuk membantu menjalankan berbagai fungsi pengelolaan yang baik dan akuntabel. Salah Satu dokumen yang memerlukan informasi ini adalah dokumen rencana bisnis BUMdes yang juga harus dibuat dalam rangka mengembangkan usahanya (Hunt, 2013).

Ketersediaan laporan keuangan menjadi bagian yang sangat penting dalam pengambilan keputusan rasional (Hopwood, 2009). Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi (IAI, 2012). Untuk menghasilkan laporan keuangan yang andal diperlukan syarat, yaitu laporan keuangan harus berasal dari kebijakan akuntansi yang diterapkan secara konsisten dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (PABU).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, diperlukan pendampingan akademis bagi pengelola BUMDes dalam mengembangkan kemampuan manajerialnya melalui Bimbingan Teknis Pengelolaan BUMDes, dalam merancang kebijakan akuntansi untuk BUMDes sesuai dengan karakteristiknya dan mengacu pada SAK ETAP.

METODE

Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan penyuluhan dengan metode FGD dan bimbingan teknis. Peserta adalah pimpinan dan pengurus BUMDes, ditambah dengan Pembina dari pemerintahan desa dan tokoh masyarakat pemerhati perkembangan BUMDes.

Berdasarkan metode yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat ini, maka luaraan (*outcome*) yang diharapkan adalah:

- 1) Pengelola mengenal dan memahami tujuan dan pentingnya kebijakan akuntansi yang diterapkan secara konsisten;
- 2) Pengelola mampu mengidentifikasi komponen-komponen penting dalam penyelenggaraan pencatatan akuntansi;
- 3) Pengelola termotivasi untuk mendalami pengetahuan dan keterampilan pendukung lainnya sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan dan memanfaatkannya untuk pengambilan keputusan;
- 4) Pengelola memahami pentingnya pencatatan transaksi, penggolongan, dan pengikhtisaran laporan keuangan, serta interpretasinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

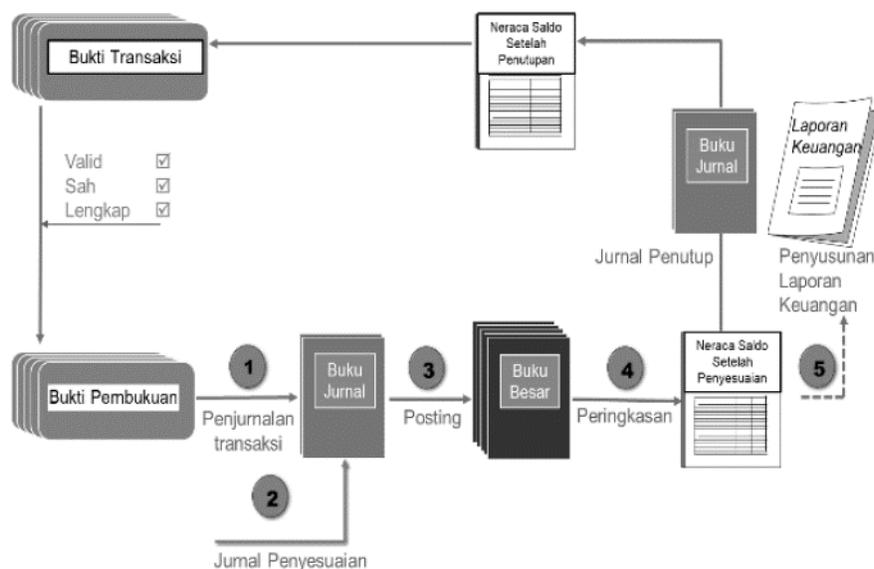
Langkah pertama dalam perancangan akuntansi BUMDes Maju Jaya adalah melakukan *mapping* analisis dan evaluasi terhadap catatan dan laporan keuangan BUMDes yang sudah dijalankan. Hasil identifikasi ditemukan beberapa kelemahan sistem pencatatan yang telah disusun oleh pengelola. Langkah berikutnya adalah melakukan *mapping* akun laporan keuangan BUMDes dengan Standar Akuntansi ETAP. Berdasarkan *mapping* data dan informasi yang diperoleh, dapat dilihat bahwa laporan keuangan yang selama ini dibuat terdiri dari:

- Catatan Penerimaan dan Pengeluaran Kas;
- Daftar Inventaris;
- Daftar Peternak Sapi Mitra Usaha;

Berdasarkan *mapping* tersebut, dapat disimpulkan, pertama, format laporan keuangan belum sesuai dengan ketentuan dalam Standar Akuntansi yang berlaku. Kedua, akun-akun laporan keuangan dan neraca belum lengkap, Ketiga, nama akun yang tidak seragam dan tidak konsisten antar periode. Keempat, pengakuan dan pengukuran masing-masing akun masih menggunakan basis kas (*Cash Basis*). Kelima, BUMDes belum mengakui penyusutan aset tetap selain tanah.

Pengelola BUMDes Maju Jaya belum terutama belum memiliki pedoman kebijakan terkait akuntansinya. Kebijakan akuntansi ini sangat penting sebagai pedoman pelaporan keuangan, karena kebijakan akuntansi menjadi dasar dalam menyelenggarakan catatan-catatan akuntansi dan menyusun serta menyajikan laporan keuangan. Sebagai pedoman pelaksanaan bagi pelaksana fungsi akuntansi BUMDes, kebijakan akuntansi akan memuat: (1) Konsep dasar, prinsip dan metode akuntansi, (2) Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi atau peristiwa keuangan, (3) Sebagai sumber rujukan (referensi) dalam memecahkan masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan

akuntansi dan perlakuan akuntansi terhadap suatu transaksi atau kegiatan BUMDes agar terjamin adanya konsistensi dan keseragaman dalam pelaksanaan akuntansi BUMDes. Kebijakan akuntansi tersebut selanjutnya menjadi pedoman pelaporan keuangan BUMDes Maju Jaya yang diwujudkan dalam mekanisme pelaporan yang terstruktur dan terorganisasi dalam satu siklus akuntansi untuk setiap periode pelaporan. Siklus akuntansi BUMDes tersebut dapat digambarkan sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1 berikut.



Gambar 1. Rancangan Siklus Akuntansi BUMDes Maju Jaya

PENUTUP

Bimbingan teknis kepada pengelola BUMDes Maju Jaya ini merupakan kelanjutan dari Bimtek sebelumnya. Sebelumnya, telah dilakukan bimtek tata cara membuat rencana bisnis hingga menyusun analisis SWOT. Jadi, pada dasarnya telah dilakukan bimbingan tentang bagaimana pengelolaan BUMDes dengan manajemen modern, namun tetap sederhana dan mudah dilakukan. Untuk menunjang tata kelola yang diharapkan, maka pengelola memerlukan informasi akuntansi keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan. Untuk menyediakan informasi keuangan yang sesuai dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan, diperlukan pemahaman dan penerapan kebijakan akuntansi yang sesuai dengan karakteristik BUMDes. Pada kegiatan lanjutan, diperlukan BUMDes bimbingan teknis operasionalisasi pencatatan klerikal akuntansi yang meliputi pencatatan transaksi, penggolongan, pengikhtisaran catatan akuntansi ke dalam laporan keuangan, atau laporan lainnya yang diperlukan.

REFERENSI

- Dewi, A. S. K. (2014). Peranan badan usaha milik desa (bumdes) sebagai upaya dalam meningkatkan pendapatan asli desa (pades) serta menumbuhkan perekonomian desa. *Journal of Rural and Development, Volume V No. 1 Februari 2014*.
- Harto, P. P. (2018). Tinjauan teoritis laporan keuangan badan usaha milik desa (bumdes) berbasis syariah *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam, 167-188*.
- Hopwood, A. G. (2009). Accounting and the environment. *Accounting, Organizations and society, 34(3-4), 433-439*. doi:10.1016/j.aos.2009.03.002
- Hunt, S. D. (2013). A general theory of business marketing: R-a theory, alderson, the isbm framework, and the imp theoretical structure. *Industrial Marketing Management, 42(3), 283-293*. doi:10.1016/j.indmarman.2013.02.002
- IAI. (2012). *Standar akuntansi keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Permendes, dan PDTT. (2015). Tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran badan usaha milik desa. *No 4*.
- Undang-undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang desa*.